



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.401113/2025**



DS:2304-5407-8206-2695

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02

Tanggal : 10 Maret 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 181.200.000 (SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Jumlah Uang

Rp. 181.200.000
Rp. 181.200.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	91.850.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	89.350.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 181.200.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.401113/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2304-5407-8206-2695

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			181.200.000
Kegiatan	:	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			181.200.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1053.AEA	Koordinasi	9,00	kegiatan	181.200.000
Rincian Output	:	01	AEA.003 Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	7,00	kegiatan	66.850.000
		02	AEA.006 Koordinasi Pengelolaan PNPB	1,00	kegiatan	89.350.000
		03	AEA.007 Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	1,00	kegiatan	25.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.04.2.401113/2025

I B. SUMBER DANA



DS:2304-5407-8206-2695

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Halaman : I B. 1

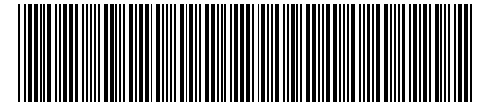
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	181.200.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	91.850.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.401113/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2304-5407-8206-2695

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	-	181.200	-	-	-	181.200	01 . 55	
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	181.200	-	-	-	181.200		
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	181.200	-	-	-	181.200		
1053.AEA	Koordinasi (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	181.200	-	-	-	181.200		
01	RM	-	91.850	-	-	-	91.850		
04	PNBP	-	89.350	-	-	-	89.350	175@	
JUMLAH		-	181.200	-	-	-	181.200		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.401113/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2304-5407-8206-2695

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	121.660	0	9.594	0	0	32.310	17.636	181.200
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	121.660	0	9.594	0	0	32.310	17.636	181.200
	005.04.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	0	0	0	0	0	121.660	0	9.594	0	0	32.310	17.636	181.200
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	121.660	0	9.594	0	0	32.310	17.636	181.200
		PERKIRAAN PENERIMAAN	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1.740
		- PNBP (425239)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1.740

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.401113/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2304-5407-8206-2695

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [401113] PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

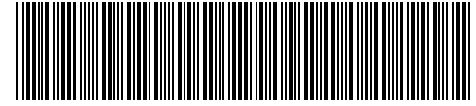
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	122.481
	52 Belanja Barang	Rp.	122.481
005.04.BF 1053	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		
1053.AEA	Koordinasi		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.336
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	79.920
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	40.225
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.04.2.401113/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:2304-5407-8206-2695

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [401113] PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004